

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Sebagai bangsa yang sedang berkembang, Indonesia dihadapkan pada globalisasi yang memfokuskan pada pertumbuhan serta pembangunan di segala bidang. Segala permasalahan tersebut telah menimbulkan kesenjangan kehidupan yang tidak sederhana. Mulai dari skala internasional, nasional maupun dalam skala kecil atau lokal.

Salah satu pertumbuhan yang sangat berperan penting dalam perkembangan bangsa Indonesia adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan perekonomian di Indonesia dalam beberapa tahun ini mengalami kelambatan meskipun masih relatif lebih baik dari pertumbuhan yang dialami oleh negara-negara di kawasan ASEAN. Perlambatan kegiatan perekonomian ini tidak terlepas dari perkembangan kondisi di dalam dan luar negeri yang kurang menguntungkan.

Dari dalam negeri, perlambatan ini terutama disebabkan oleh lambatnya restrukturisasi utang dan sektor korporasi, masih berlangsungnya konsolidasi internal perbankan serta beratnya beban keuangan pemerintah. Sementara itu, masih tingginya risiko dan ketidakpastian sehubungan dengan meningkatnya ketegangan sosial dan politik, belum lagi menurunnya kepercayaan dunia usaha untuk melakukan kegiatan produksi dan investasi yang akan menghambat ekspansi ekonomi.

Penanaman modal merupakan langkah awal kegiatan produksi. Dengan posisi ini, investasi pada hakekatnya juga merupakan langkah awal kegiatan pembangunan ekonomi. Dinamika investasi mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi, hal ini mencerminkan marak lesunya pembangunan. Dalam upaya menumbuhkan perekonomian, setiap negara senantiasa berusaha menciptakan iklim yang dapat menggairahkan investasi. Sasaran yang dituju bukan hanya masyarakat atau kalangan swasta dalam negeri, tetapi juga investor asing. Begitupun dengan Indonesia terus berusaha untuk meningkatkan investasi sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi. (Dumairy, 1997: 132).

Investasi adalah suatu fungsi pendapatan dan tingkat bunga, dilihat dengan kaitannya  $I = (Y, i)$ . Suatu pertambahan pada pendapatan akan mendorong investasi yang lebih besar, dimana tingkat bunga yang lebih tinggi akan menurunkan minat untuk investasi sebagaimana hal tersebut akan lebih mahal dibandingkan dengan meminjam uang. Walaupun jika suatu perusahaan lain memilih untuk menggunakan dananya sendiri untuk investasi, tingkat bunga menunjukkan suatu biaya kesempatan dari investasi dana tersebut daripada meminjamkan untuk mendapatkan bunga.

Dengan adanya peningkatan pendapatan nasional yang dapat dilihat dari PDB akan dapat meningkatkan investasi. Karena terjadinya investasi baru karena adanya peningkatan pendapatan. Salah satu pembiayaan pendapatan adalah untuk pembangunan infrastruktur. Karena dengan ketersediaan infrastruktur akan menunjang iklim investasi yang lebih baik.

Dalam model klasik tinggi rendahnya investasi dipengaruhi oleh tingkat suku bunga. Suku bunga adalah harga yang harus dibayar oleh peminjam (dalam hal ini adalah investor) untuk pemakaian sumber daya selama jangka waktu tertentu. Dalam ekonomi sederhana, semua peminjaman dilakukan oleh perusahaan, dengan tujuan berinvestasi. Faktor yang mempengaruhi keputusan peminjaman adalah keuntungan dari investasi. Jumlah yang akan diinvestasikan oleh sebuah perusahaan tergantung pada suku bunga, yaitu biaya dari pinjaman. Perusahaan hanya akan berinvestasi sepanjang tingkat suku bunga lebih tinggi dibanding modal yang dikeluarkan perusahaan tersebut untuk berinvestasi

Investasi merupakan faktor penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, hal ini dikarenakan investasi adalah salah satu faktor penentu dari keseluruhan tingkat output dan kesempatan kerja dalam jangka pendek. Ketika pengeluaran investasi tumbuh dengan cepat maka output juga cenderung tumbuh (Samuelson, 1994 : 22).

Senada dengan teori pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan oleh **Harrod-Domar** bahwa investasi memiliki peran dalam perekonomian, yaitu merupakan bagian dari pengeluaran agregat dan sebagai penambah jumlah barang-barang modal dalam masyarakat. Dengan kata lain, investasi akan mempertinggi kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang produksi.

Investasi dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi dengan mendatangkan lebih banyak input ke dalam proses produksi. Dengan adanya investasi yang baik akan mendorong produktivitas yang lebih tinggi dengan memberikan kesempatan-kesempatan dan insentif kepada perusahaan-perusahaan untuk berkembang,

menyesuaikan diri, dan menerapkan cara-cara yang baik dalam menjalankan kegiatannya. (**Laporan Pembangunan Dunia 2005 : 2-4**)

Bagi Indonesia, kegiatan investasi langsung baik yang berbentuk investasi asing langsung (*foreign direct investment*) maupun investasi langsung dalam negeri (penanaman modal dalam negeri) mempunyai kontribusi secara langsung terhadap pembangunan. Investasi langsung akan semakin mendorong pertumbuhan ekonomi, alih teknologi dan pengetahuan, serta menciptakan lapangan kerja baru sehingga akan mengurangi tingkat pengangguran dan mampu meningkatkan daya beli masyarakat.

Perkembangan investasi di Indonesia pada awal tahun 70-an hingga akhir 80-an sangat baik, Jepang bahkan melakukan investasi besar-besaran di Indonesia. Tak kurang dari 900 perusahaan Jepang telah melakukan investasi yang melibatkan lebih dari US\$ 11 Milyar dan mempekerjakan lebih dari 282.000 orang. Pertumbuhan investasi yang cepat terus berlangsung hingga tahun 1996, seiring dengan berbagai kebijakan liberalisasi di bidang keuangan dan perdagangan yang dikeluarkan oleh pemerintah. (**Ida Bagus Rahmadi, 2006 :11**)

Sayangnya, praktek korupsi, kolusi dan nepotisme telah menghancurkan sendi-sendi fundamentalis Indonesia yang berujung pada terjadinya krisis keuangan pada tahun 1997-1998 ditambah krisis-krisis yang lain, telah memperlemah sistem keuangan dan pemerintahan (*governance*) yang menyebabkan penurunan investasi dan perlambatan perkembangan sektor swasta. Investasi menurun drastis, menurunkan kegiatan perekonomian secara umum. Bahkan sempat terjadi arus investasi yang negatif selama beberapa tahun. Hal ini

disebabkan oleh tingginya angka *capital outflow* dibandingkan dengan *capital inflow*. Terjadinya *capital outflow* disebabkan oleh banyak dilakukannya relokasi usaha sehubungan dengan beberapa permasalahan yang dihadapi.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong iklim investasi di Indonesia. Sayangnya upaya tersebut dapat dikatakan tidak membawa hasil yang signifikan. Nilai persetujuan dan realisasi investasi relatif rendah, demikian pula daya tarik investasi Indonesia pun rendah. Berbagai promosi dan kunjungan kepala negara beserta delegasi pejabat tinggi dan pengusaha Indonesia ke luar negeri, masih belum mampu meyakinkan masyarakat dunia usaha untuk berinvestasi di Indonesia. Iklim investasi di Indonesia masih dianggap tidak lebih baik dibanding negara-negara tetangga.

Perkembangan investasi swasta di Indonesia mengalami fluktuasi tajam dengan pertumbuhan per tahun dapat dilihat pada tabel 1.1 di bawah ini.

**Tabel 1.1 Perkembangan Realisasi Investasi Swasta Indonesia**  
**Periode 1988-2007 ( Dalam Milyar Rupiah )**

TAHUN	JUMLAH PROYEK	PERSETUJUAN	REALISASI	PERTUMBUHAN (%)
1988	935	24.307,3	15.120,3	-
1989	1.157	20.106,8	14.510,5	-4,03
1990	1.756	65.261,6	19.207,6	32,37
1991	1.180	58.179,4	14.441,9	-24,80
1992	741	50.297,8	11.919,4	-17,47
1993	877	56.447,3	56.443,2	373,54
1994	1.272	104.794,6	79.468,0	40,79
1995	1.574	159.940,5	100.298,8	26,21
1996	1.769	83.257,4	105.869,2	5,55
1997	1.508	337.449,7	110.317,1	4,20
1998	1.359	201.127,4	77.406,0	-29,83
1999	1.401	138.453,1	47.441,7	-38,71
2000	1.116	102.451,0	67.356,8	41,98
2001	1.598	207.768,4	44.525,5	-33,90
2002	1.339	114.584,1	40.778,2	-8,41
2003	1.256	166.688,7	59.046,0	44,80
2004	1.368	133.075,2	58.034,1	-1,70
2005	1.866	182.129,3	117.145,7	101,86
2006	1.935	303.695,7	74.739,6	-36,20
2007	2.105	204.499,8	46.335,4	-38,1
<b>Jumlah</b>	<b>28.112</b>	<b>2.694.408,30</b>	<b>1.160.405,00</b>	<b>336,29</b>
<b>Rata-rata</b>	<b>1.405,6</b>	<b>134.720,41</b>	<b>58.020,25</b>	<b>16,81</b>

Sumber : BPS, BKPM, KADIN, (data diolah)

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa perkembangan investasi dari tahun 1988 hingga tahun 2007 mengalami fluktuatif. Sejak tahun 1988-2007 tercatat proyek investasi sebanyak 28.112, nilai investasi swasta sebesar 1.160.405,00 milyar rupiah, dengan rata-rata pertumbuhan 16,81 % per tahun.

Tetapi ada beberapa perubahan yang cukup signifikan terjadi pada perkembangan nilai investasi swasta di Indonesia, jika dibandingkan sebelum krisis pada tahun 1998 dengan setelah krisis yaitu tahun 1999. Hal ini dapat dilihat jika pada periode tahun 1988-1998 jumlah proyek mencapai 14.128 proyek

dengan nilai realisasi sebesar 605.002. maka nilai ini mengalami penurunan pada 1999-2007, dimana jumlah proyek menurun menjadi 13.984 proyek sehingga nilai realisasi juga ikut menurun, yaitu menjadi 555.403.

Rendahnya investasi pada tahun-tahun terakhir disebabkan oleh sejumlah faktor seperti meningkatnya ketidakpastian, gangguan keamanan, dan ketidakpastian penegakkan hukum. Selain itu, rendahnya kegiatan investasi juga dipengaruhi oleh fungsi intermediasi perbankan yang belum sepenuhnya pulih, adanya peraturan daerah yang kurang kondusif bagi kegiatan investasi, relatif tingginya tingkat suku bunga didalam negeri dan lambatnya restrukturisasi utang luar negeri. Sebagai akibatnya perusahaan cenderung untuk lebih memfokuskan diri pada pembenahan internal, sehingga realisasi investasi baru maupun perluasan kapasitas produksi masih sangat rendah.

Turunnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia terutama disebabkan oleh turunnya pengeluaran untuk investasi. Oleh karena itu, perilaku investasi penting untuk diketahui guna merumuskan kebijakan stabilisasi dalam usaha meminimalkan pengaruh buruk fluktuasi investasi terhadap perekonomian.

Beberapa faktor nonekonomi dipercaya sangat berpengaruh terhadap penanaman investasi. Tingginya faktor risiko dan ketidakpastian hukum di Indonesia serta kurangnya infrastruktur pendukung menyebabkan investor enggan untuk berinvestasi di Indonesia. Birokrasi dan administrasi yang terkesan berbelit dan tidak mampu menjamin keamanan investasi menjadi masalah tersendiri. Di sisi regulasi, Indonesia telah memiliki undang-undang tentang investasi, namun itu belum cukup untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia.

Di sektor perbankan, krisis ekonomi mengakibatkan intermediasi perbankan tidak berjalan normal sehingga mendorong terjadinya fenomena *credit crunch*. Sebagai alternatif terhadap berkurangnya sumber pembiayaan perbankan, pembiayaan dari sektor lain mulai berkembang. Secara umum, sebagai akibat dari terbatasnya sumber pembiayaan investasi dan iklim investasi yang tidak kondusif menyebabkan pangsa investasi turun hingga mencapai sekitar 24%.

Meskipun pemerintah terus berupaya keras mendorong tingkat investasi dalam negeri, namun minat investasi di Indonesia masih belum meningkat secara berarti sampai saat ini. Belum membaiknya kondisi investasi secara keseluruhan juga dapat dilihat dari angka-angka yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Meskipun angka persetujuan penanaman modal dalam negeri (PMDN) meningkat secara signifikan dalam periode 2005, namun ternyata bukanlah jaminan sebagai tanda membaiknya investasi dalam negeri.

Dengan belum membaiknya tingkat investasi dan minat investasi secara keseluruhan, selayaknya pemerintah berhati-hati dalam menyikapi perkembangan indikator ekonomi makro belakangan ini. Pemerintah hendaknya tidak hanya berpegang pada dicapainya stabilitas ekonomi makro semata, sementara perbaikan sektor riil masih jauh dari harapan. Apalagi harus diakui, bahwa terjadinya stabilitas nilai tukar rupiah bukanlah suatu hasil upaya keras pemerintah, tetapi sangat didukung oleh berbagai faktor eksternal yang memungkinkan kondisi tersebut terjadi.

Menurut hasil penelitian IMD (*International Institute for Management Development*) yang berbasis di Lausanne (Swiss) dalam *World Competitive Report Yearbook 2005*, yang dilakukan terhadap negara-negara, baik di kawasan Asia Pasifik maupun di 60 negara di seluruh dunia mengenai iklim investasi. Parameter yang digunakan adalah kinerja ekonomi, efisiensi pemerintah, efisiensi bisnis dan kualitas infrastruktur. Hasil penelitian menyatakan Indonesia ada di urutan terbawah di kawasan Asia Pasifik, sedangkan di 60 negara di seluruh dunia, Indonesia berada pada urutan ke 60. (Ida Bagus Rahmadi, 2006 : 16)

Sedangkan penelitian dari **Bank Dunia** pada tahun 2008, Indonesia menempati peringkat ke-123 sebagai negara tujuan investasi di dunia dari 178 negara. Peringkat ini lebih baik jika dibandingkan dengan peringkat Indonesia pada tahun 2007. Indonesia menempati peringkat 135 dari 175 negara. Yang menjadi kendala dalam iklim investasi di Indonesia adalah rumitnya perizinan dan buruknya infrastruktur.

Beragam proyek infastruktur yang ditawarkan dinilai cukup menarik dan diminati calon investor, namun sebagian investor masih bersikap *wait and see* menunggu langkah lanjutan pemerintah dalam mengatasi berbagai kendala investasi. Berkaitan dengan investasi di sektor infrastruktur, hal yang paling mendasar yang diharapkan para investor adalah masalah jaminan oleh pemerintah selama pelaksanaan dan setelah penyelesaian proyek, yang ternyata tidak akan diperoleh oleh pihak swasta. Keterbatasan anggaran negara menyebabkan pemerintah tidak akan mampu memberi jaminan kepada pihak swasta berkaitan dengan pembangunan proyek infrastruktur.

Secara umum, kondisi infrastruktur masih menghadapi berbagai kendala diantaranya adalah belum optimalnya pelayanan infrastruktur dasar sesuai standar pelayanan minimal, seperti rendahnya tingkat keselamatan transportasi dan akses terhadap pelayanan transportasi untuk masyarakat miskin dan masyarakat yang tinggal di kawasan terpencil dan perbatasan. Rendahnya akses masyarakat terhadap pelayanan air minum, serta menurunnya kualitas layanan pos, telekomunikasi, informatika dan penyiaran, dan tingginya biaya internet dan layanan telekomunikasi.

Data lain yang menunjukkan buruknya kondisi infrastruktur Indonesia adalah **Asian Development Bank** (2005: 14), berdasarkan “*Survey Iklim Investasi dan Produktivitas di Indonesia 2003*”, sekitar 37% perusahaan yang disurvei menganggap pelayanan listrik menjadi hambatan utama apabila dibandingkan dengan telekomunikasi dan transportasi. Untuk mendapatkan sambungan listrik rata-rata diperlukan waktu 15 hari. Pengalaman terburuk terjadi pada industri elektronik yang membutuhkan waktu sekitar 45 hari. Untuk sambungan telepon, rata-rata dibutuhkan waktu 27 hari. Waktu terlama terjadi pada industri perkayuan yang mencapai waktu sekitar 50 hari

Buruknya iklim investasi tersebut tidak hanya menyangkut stabilitas politik dan sosial, tetapi menyangkut stabilitas ekonomi, infrastruktur dasar (listrik, telekomunikasi, prasarana jalan dan pelabuhan). Banyak investor mengeluhkan mengenai kesulitan yang dihadapi untuk memperoleh fasilitas seperti komunikasi, transportasi, listrik dan air yang memadai. Kesulitan suplai listrik juga telah menambah kerugian sebesar 4% dari total pendapatan.

Dengan melihat berbagai permasalahan tentang penurunan investasi yang disebabkan oleh tingkat suku bunga kredit investasi Indonesia dan buruknya pembangunan infrastruktur yang dibiayai oleh pendapatan nasional, maka dari itu diperlukan analisis yang lebih lanjut lagi mengenai investasi.

Atas dasar hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INVESTASI SWASTA DI INDONESIA PERIODE 1988-2007”**

## **1. 2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diidentifikasi bahwa permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana pengaruh Tingkat Bunga terhadap investasi swasta di Indonesia periode 1988-2007?
2. Bagaimana pengaruh Infrastruktur terhadap investasi swasta di Indonesia periode 1988-2007?
3. Bagaimana pengaruh Pendapatan Nasional terhadap investasi swasta di Indonesia periode 1988-2007?
4. Bagaimana pengaruh Tingkat Bunga, Infrastruktur dan Pendapatan Nasional secara bersama-sama terhadap investasi swasta di Indonesia periode 1988-2007?

### **1. 3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Bunga terhadap investasi swasta di Indonesia periode 1988-2007.
2. Untuk mengetahui pengaruh Infrastruktur terhadap investasi swasta di Indonesia periode 1988-2007.
3. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Nasional terhadap investasi swasta di Indonesia periode 1988-2007.
4. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Bunga, Infrastruktur dan Pendapatan Nasional secara bersama-sama terhadap investasi swasta di Indonesia periode 1988-2007.

#### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis, secara teoritis penelitian ini berguna untuk :
  - Pengembangan ilmu ekonomi khususnya dalam pertumbuhan ekonomi
  - Sebagai bahan informasi serta tambahan dalam ilmu ekonomi khususnya mengenai investasi swasta
2. Kegunaan Praktis, secara praktis penelitian ini juga berguna untuk:
  - Memberi masukan dan informasi tambahan bagi perkembangan ilmu ekonomi
  - Bagi penulis, dengan membuat penelitian ini dapat menambah pengalaman serta pengetahuan tentang cara membuat laporan penelitian yang baik dan sesuai dengan kaidah yang berlaku.

#### 1.4. Kerangka Pemikiran

Investasi merupakan salah satu faktor penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Ada dua peran yang dibawa oleh investasi dalam makroekonomi, yaitu :

1. Investasi merupakan komponen pengeluaran yang cukup besar dan berubah-ubah. Dengan demikian perubahan besar dalam investasi akan sangat mempengaruhi permintaan agregat dan akhirnya berakibat juga pada output dan tenaga kerja
2. Investasi menghimpun akumulasi modal. Dengan membangun sejumlah gedung dan peralatan yang berguna, output potensial suatu negara akan bertambah, dan pertumbuhan jangka panjang juga akan meningkat.

#### **Samuelson dan Nordhauss (1990 : 179)**

Mengemukakan bahwa Perilaku investasi demikian sulit diramalkan karena memang berubah. Perilaku investasi demikian sulit diramalkan karena memang tergantung pada faktor-faktor yang tidak stabil, seperti faktor keberhasilan dan kegagalan produk baru yang coba dipasarkan, perubahan tarif pajak dan tingkat bunga, faktor politik dan pendekatan yang digunakan pemerintah untuk menstabilkan perekonomian, faktor neraca perdagangan luar negeri, nilai valuta dan juga faktor peristiwa ekonomi lainnya yang sering berubah-ubah.

Investasi merupakan suatu hal yang penting dalam pembangunan ekonomi karena dibutuhkan sebagai faktor penunjang di dalam peningkatan proses produksi. Investasi merupakan langkah mengorbankan konsumsi saat ini untuk memperbesar konsumsi pada masa datang. Selain itu, investasi mendorong terjadinya akumulasi modal. Penambahan stok bangunan gedung dan peralatan

penting lainnya akan meningkatkan output potensial suatu bangsa dan merangsang pertumbuhan ekonomi untuk jangka panjang.

**Joseph Alois Schumpeter** (Dalam Muana Nanga, 2005: 124)

Membedakan investasi ke dalam investasi terpengaruh (*induced investment*) yaitu investasi yang besar kecilnya sangat tergantung atau dipengaruhi oleh perubahan di dalam pendapatan nasional, volume perizinan, keuntungan perusahaan; dan investasi otonom (*autonomus investment*) yaitu investasi yang besar kecilnya dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, tetapi lebih banyak ditentukan oleh perubahan-perubahan yang bersifat jangka panjang seperti penemuan baru, perkembangan teknologi dan sebagainya.

**Sadono Sukirno** (2004: 122) memberikan definisi investasi sebagai pengeluaran-pengeluaran penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. Menurut Sadono Sukirno, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi investasi adalah sebagai berikut :

1. Ramalan mengenai keadaan yang akan datang,
2. Tingkat bunga,
3. Perubahan dan perkembangan teknologi,
4. Tingkat pendapatan nasional, dan
5. Keuntungan yang dapat dicapai oleh perusahaan.

**J.M Keynes** (Dalam Herlan Firmansyah, 2004 :17)

“Investasi memainkan peranan penting dalam masyarakat, khususnya dalam masyarakat yang sedang membangun, investasi bagaikan motor yang menggerakkan kehidupan ekonomi nasional, karena pembentukan modal, kapasitas produksi, menaikkan PDB, menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan. Oleh karena itu pemerintah disamping melaksanakan sendiri juga mendorong investasi swasta”

Secara singkat, investasi dapat didefinisikan sebagai tambahan bersih terhadap stok kapital yang ada. Berdasarkan teori ekonomi, investasi berarti pembelian (dan berarti juga produksi) dari kapital/modal barang-barang yang tidak dikonsumsi tetapi digunakan untuk produksi yang akan datang (barang produksi). Contoh termasuk membangun rel kereta api, atau suatu pabrik, pembukaan lahan, atau seseorang sekolah di universitas.

Investasi juga merupakan suatu konsep aliran (*flow concept*), karena besarnya dihitung selama satu interval periode tertentu. Tetapi investasi akan mempengaruhi jumlah barang modal yang tersedia (*capital stock*) pada satu periode tertentu. Tambahan stok barang modal adalah sebesar pengeluaran investasi pada periode sebelumnya.

Senada dengan pengertian investasi dalam model teori ekonomi klasik, dimana investasi menunjukkan tambahan terhadap stok kapital tetap. Disini ada dua faktor yang menjadi pertimbangan. Pertama, biaya modal, yaitu tingkat bunga yang harus ditanggung oleh investor. Kedua adalah tingkat penerimaan yang mungkin diperoleh dari setiap tambahan stok kapital baru.

Investasi merupakan salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi. Pada perekonomian tertutup, sumber dana investasi berasal dari tabungan domestik, sedangkan pada perekonomian terbuka, dana dapat diperoleh melalui pinjaman

luar negeri (**Kuncoro**, 1997:145). Teori makro Keynes menjelaskan bahwa keputusan apakah suatu investasi dilaksanakan atau tidak, tergantung kepada perbandingan antara besarnya keuntungan yang diharapkan dan ongkos penggunaan dana atau tingkat bunga (**Boediono**, 1980:47).

Tingkat keuntungan yang diharapkan menurut teori makro Keynes disebut dengan *Marginal Efficiency of Capital* ( MEC ), sedangkan perilaku investor dalam mengambil keputusan dijelaskan dalam bentuk fungsi investasi. Fungsi investasi menunjukkan hubungan antara tingkat bunga yang berlaku dengan tingkat pengeluaran investasi yang diinginkan.

**John Maynard Keynes** mendasarkan teori tentang permintaan investasi atas konsep marginal kapital (*marginal efficiency of capital* atau MEC). MEC dapat didefinisikan sebagai tingkat perolehan bersih yang diharapkan (*expended net rate of return*) atas pengeluaran tambahan. MEC dapat juga dapat diartikan tingkat diskonto (*discount rate*) yang menyatakan aliran perolehan yang diharapkan dimasa yang akan datang dengan biaya sekarang dari kapital tambahan. (**Muana Nanga**, 2005 : 124)

Sedangkan menurut **Teori Neo-Klasik** tentang investasi (*neoclassical theory of investment*) merupakan teori tentang akumulasi kapital optimal. Menurut teori ini, stok kapital yang diinginkan ditentukan oleh output dan harga dari jasa kapital relatif terhadap harga output. Harga jasa kapital pada gilirannya bergantung pada harga barang-barang modal, tingkat bunga, dan perlakuan pajak atas pendapatan perusahaan. Jadi, menurut teori Neo-Klasik perubahan dalam output atau harga jasa kapital relatif terhadap harga output akan mengubah atau

mempengaruhi stok kapital yang diinginkan atau juga investasi. (Muana Nanga, 2005 : 130).

Dalam model klasik tinggi rendahnya investasi dipengaruhi oleh tingkat suku bunga. Suku bunga adalah harga yang harus dibayar oleh peminjam (dalam hal ini adalah investor) untuk pemakaian sumber daya selama jangka waktu tertentu. Dalam ekonomi sederhana, semua peminjaman dilakukan oleh perusahaan, dengan tujuan berinvestasi. Faktor yang mempengaruhi keputusan peminjaman adalah keuntungan dari investasi. Jumlah yang akan diinvestasikan oleh sebuah perusahaan tergantung pada suku bunga, yaitu biaya dari pinjaman. Perusahaan hanya akan berinvestasi sepanjang tingkat suku bunga lebih tinggi dibanding modal yang dikeluarkan perusahaan tersebut untuk berinvestasi.

Suku bunga merupakan harga dari uang, sehingga suku bunga menjadi indikator pasar uang dan menjadi indikator tingkat diskonto uang. Keseimbangan dan stabilitas ekonomi makro yang menjadi arah kebijakan ekonomi memasukkan suku bunga sebagai faktor endogenous dari sisi keseimbangan pasar produk, suku bunga secara langsung mempengaruhi investasi dan dari sisi keseimbangan pasar uang menjadi harga uang dan menentukan permintaan uang spekulatif.

Hubungan antara permintaan investasi dan tingkat bunga adalah negatif, hal ini terjadi apabila tingkat bunga turun akan menyebabkan permintaan investasi meningkat dan hal yang sebaliknya akan berlaku kalau tingkat bunga mengalami kenaikan, maka biaya untuk investasi menjadi mahal dan permintaan akan investasi akan menurun atau melemah.

Untuk lebih jelasnya, investasi juga adalah suatu komponen dari PDB dengan rumus  $PDB = C + I + G + (X-M)$ . Investasi adalah suatu fungsi pendapatan dan tingkat bunga, dilihat dengan kaitannya  $I = (Y, i)$ . Hubungan antara pendapatan dan investasi adalah positif, hal ini menunjukkan bahwa jika ada suatu pertambahan pada pendapatan maka akan mendorong investasi yang lebih besar, sedangkan hubungan antara tingkat bunga dan investasi adalah negatif, dimana tingkat bunga yang lebih tinggi akan menurunkan minat untuk investasi sebagaimana hal tersebut akan lebih mahal dibandingkan dengan meminjam uang. Walaupun jika suatu perusahaan lain memilih untuk menggunakan dananya sendiri untuk investasi, tingkat bunga menunjukkan suatu biaya kesempatan dari investasi dana tersebut daripada meminjamkan untuk mendapatkan bunga.

Di Indonesia istilah investasi ini setara dengan pembentukan modal tetap domestik bruto (PMTDB). Sehingga dengan adanya kenaikan pada pendapatan akan menyebabkan adanya kenaikan pada investasi. Hal ini sejalan dengan teori Keynes bahwa jika ada penambahan pendapatan, maka masyarakat akan menambah harta dan konsumsinya.

Penambahan pada pendapatan nasional, pada gilirannya akan menyebabkan adanya penambahan pada investasi. Teori ini disebut pula dengan teori akselerasi atau asas akselerasi, yakni pertambahan pendapatan masyarakat yang dapat mengakibatkan penambahan pula pada investasi. Secara khusus teori ini menghubungkan antara tingkat investasi dengan perubahan pendapatan nasional.

**J.M Clark** (Dalam Herlan Firmansyah, 2004:21)

“Bila permintaan untuk suatu benda konsumsi bertambah, maka hal tersebut akan menaikkan permintaan (permintaan tidak langsung = *deroved demand*) oleh faktor produksi yang bersangkutan, misalnya sebuah mesin yang membuatnya. Akan tetapi permintaan akan mesin-mesin meningkat proporsional lebih cepat daripada meningkatnya permintaan akan produk yang bersangkutan.”

Lebih lanjut pula menyatakan bahwa investasi secara langsung tergantung pada berapa banyak jumlah uang yang dikeluarkan untuk membeli benda-benda konsumsi. Sehingga dari pernyataan diatas jelaslah bahwa tingkat pendapatan nasional mempengaruhi berapa banyak jumlah uang yang dikeluarkan untuk dikonsumsi jika pendapatan meningkat, maka konsumsi akan meningkat pula. Hal ini berarti permintaan barang-barang konsumsi dan jasa akan bertambah pula. Dengan kata lain pendapatan nasional secara tidak langsung mempengaruhi perubahan tingkat investasi.

Peningkatan pendapatan nasional yang dilihat dari PDB akan meningkatkan investasi. Pengeluaran pembangunan merupakan pengeluaran yang ditujukan untuk membiayai program-program pembangunan baik fisik, seperti jalan, jembatan, gedung, sarana listrik dan komunikasi maupun pembangunan nonfisik seperti misalnya penataran, training dan sebagainya. (**Hera Susanti**, 2007 :65). Pengeluaran pembangunan yang berasal dari pendapatan nasional tersebut disebut pula pembiayaan pembangunan infrastruktur.

Hubungan antara infrastruktur, perubahan pendapatan nasional dengan investasi adalah positif, karena dengan ketersediaan infrastruktur yang baik dan ditunjang dengan adanya penambahan pada pendapatan nasional, maka akan menunjang iklim investasi yang lebih baik. Yang pada akhirnya akan

meningkatkan ekspektasi para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

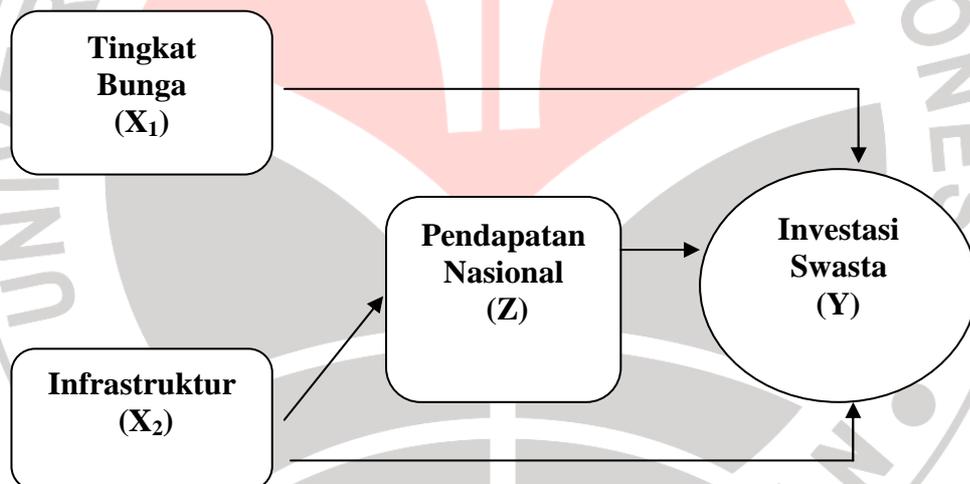
Beberapa faktor nonekonomi dipercaya sangat berpengaruh terhadap penanaman investasi. Tingginya faktor risiko dan ketidakpastian hukum di Indonesia serta kurangnya infrastruktur pendukung menyebabkan investor enggan untuk berinvestasi di Indonesia. Birokrasi dan administrasi yang terkesan berbelit dan tidak mampu menjamin keamanan investasi menjadi masalah tersendiri. Di sisi regulasi, Indonesia telah memiliki undang-undang tentang investasi, namun itu belum cukup untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia.

Dalam dasawarsa terakhir pertumbuhan pada berbagai sektor infrastruktur mengalami gejolak yang normal hingga tahun 1997, terjadi penurunan atau peningkatan pertumbuhan namun tetap bernilai positif. Pada tahun 1998, sebagai dampak dari krisis nilai tukar yang terjadi pada pertengahan tahun 1997, pertumbuhan sektor infrastruktur mengalami penurunan yang signifikan. Kecuali sektor listrik, gas dan air bersih yang masih tetap positif kontribusinya dalam total pertumbuhan yaitu sebesar 3,03 persen meski menurun dibanding tahun sebelumnya, sektor bangunan dan sektor pengangkutan dan komunikasi memberikan kontribusi negatif sebesar 36,44 persen dan 15,13 persen. Daya beli masyarakat yang menurun secara umum mengakibatkan penurunan konsumsi pada sektor infrastruktur secara drastis kecuali pada infrastruktur yang merupakan *basic needs* seperti listrik, gas dan air bersih.

Krisis ekonomi menyebabkan transportasi dan komunikasi mengalami kontraksi sebesar 15,13 persen. Daya beli masyarakat yang menurun menyebabkan angkutan udara kehilangan sekitar 40 persen penumpangnya dan berakibat pada dihapuskannya beberapa rute penerbangan. Angkutan darat mengalami kendala pada jaringan jalan nasional yang saat ini dalam kondisi kritis, bukan saja karena kurangnya dana, bahkan untuk rehabilitasi dan pemeliharaan, tetapi bahkan sebelum krisis, kualitas konstruksi jalan yang tidak optimal serta pembebanan muatan lebih (*excessive overloading*) telah menghancurkan investasi pemerintah dalam jaringan jalan nasional. Konstruksi jalan yang rusak sebelum waktu ekonominya habis menyebabkan kerugian biaya sosial yang amat besar bagi masyarakat. Kualitas dan kuantitas angkutan bus menurun dengan tajam, meningkatkan resiko dalam aspek keselamatan penumpangnya. Pada sektor angkutan laut, maskapai angkutan laut nasional mengalami kendala biaya perawatan dan operasional karena mahalnya sukucadang. Secara keseluruhan sektor transportasi terpukul oleh nilai tukar rupiah yang melemah sementara kewajiban keuangan dan alat-alat produksi harus dibayar menggunakan dolar. Pada tahun 2005, alokasi dana APBN untuk infrastruktur mencapai Rp20,9 triliun, Khusus sektor transportasi pada 2005 mencapai Rp8,9 triliun. Peningkatan alokasi anggaran saja tidak cukup untuk mengatasi masalah transportasi, sehingga perlu upaya lain misalnya reformasi regulasi transportasi, peningkatan kualitas SDM, perkuatan institusi, dan meningkatkan peran serta pihak swasta. (**Kominfo Newsroom**, 2007)

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa faktor tingkat bunga dan infrastruktur yang ditunjukkan dengan adanya perubahan pendapatan nasional menjadi faktor yang berpengaruh terhadap investasi di Indonesia. Dengan adanya penurunan tingkat bunga dan perbaikan infrastruktur melalui pendapatan nasional akan meningkatkan ekspektasi para investor dalam menanamkan modalnya di Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dibuat suatu alur berfikir, yaitu seperti berikut ini:



**Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran**

### 1. 5. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Bunga berpengaruh negatif terhadap investasi swasta di Indonesia.
2. Infrastruktur berpengaruh positif terhadap investasi swasta di Indonesia
3. Pendapatan Nasional berpengaruh positif terhadap investasi swasta di Indonesia
4. Tingkat Bunga, Infrastruktur dan Pendapatan Nasional bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap perkembangan investasi swasta di Indonesia.

